

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja diukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah.

Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran, sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indicator kegiatan yang meliputi Input (Masukan), Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil).

Kecamatan Mirit melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Mirit Tahun 2025.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

2. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{2 \times \text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

- Capaian Kinerja 95% s/d 100%	= Sangat berhasil
- Capaian Kinerja 80% s/d 85%	= Berhasil
- Capaian Kinerja 50% s/d 80%	= Cukup berhasil
- Capaian Kinerja < 50%	= Tidak berhasil

Dari uraian diatas pengukuran kinerja sasaran secara umum Kecamatan Mirit sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 4 (empat) sasaran strategis dengan capaian sebesar 104,16 %

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis organisasi adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capai an (%)
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	- Presentase Capaian Pelayanan Kecamatan - Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	88,17 B	91,84	100
2.	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	%	100	100	100
3.	Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin	Dok	6	6	100
4.	Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, kemanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik	Jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	Keg	1	1	100
		Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa	Keg	2	2	100
		Prosentase warga yang berperan dalam politik	%			
		Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	Keg	1	1	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran yang cukup memadai. Hambatan/masalah yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah SDM/personil, baik di kecamatan maupun desa.

REALISASI ANGGARAN

Secara umum OPD Kecamatan Mirit telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026, dimana pada tahun 2025 telah melaksanakan 4 (empat) sasaran strategis dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan yaitu pada pelaksanaan program kegiatan yang dilimpahkan oleh Bupati yang merupakan program kegiatan OPD Badan Pendapatan Daerah dalam hal penanganan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari 4 (empat) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan yang dicapai diuraikan yang merupakan indikator kinerja utama. Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini ;

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERKURANG/ BERTAMBAH	Prosentase (%)
1	2	3	4	6	5
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.259.005.500	1.897.166.876	361.838.624	83,98%
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahaan Dan Pelayanan Publik	35.172.500	32.587.648	2.584.852	92,65%
III.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.260.000	13.211.000	49.000	99,63%
IV.	Progarm Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	109.255.000	107.636.305	1.618.695	98,52%
JUMLAH BELANJA		2.416.693.000	2.050.601.829	366.091.171	84,85%

Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai 83,98%, pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencapai 92,99% dan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hanya tercapai 82,73% hal ini karena adanya pegawai yang pensiun dan keskosongan pada jabatan Struktural yaitu Kasi ketentraman dan keteriban, kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial, sedangkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mencapai 91,54%.

Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahaan Dan Pelayanan Publik sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai 92,65% dimana pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan mencapi 96,54 dan Sub Kegiataan Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan yang terkait dengan Nonperizinan mencapai 92,01%

Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sampai dengan 31 Desember 2025 pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan

dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 99,63%.

Terlaksananya Progarm Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sampai dengan 31 Desember 2025 pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencapai 98,52%. Yang terdiri dari 8 (delapan) Sub Kegiatan diantaranya;

- 1) Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dari pagu anggaran Rp.13.616.000 terealisasi 96,59% dari pagu anggaran tersebut untuk melaksanakan kegiatan kegiatan Fasilitasi Penyusunan APBDes Murni, Fasilitasi Penyusunan APBDes Perubahan dan Desk RAB secara umum dapat berjalan dengan lancar, namun masih ada kendala pada kegiatan iventarisasi pengelolaan Aset Desa, adapun solusinya dilaksanakan pembinaan iventarisasi pengelolaan Aset Desa.
- 2) Sub kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dari anggaran 1.840.000 terealisasi 100 % untuk melaksanakan kegiatan rapat koordinasi penyampaian informasi kepada Desa yang kosong Kepala Desanya (Sitibentar dan Desa Winong)
- 3) Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terealisasi 98,96%, dari 22 Desa yang melaksanakan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ada 8 (delapan) desa yaitu Desa Lembupurwo, Sarwogadung, Krubungan, Singoyudan, Miritpetikusan, Karanggede, Tlogodepok Kertodeso. Kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa dari pagu anggaran Rp 9.000.000 terealisasi 98,80% dari pagu anggaran tersebut untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi ADD dan DD, bimbingan teknis pengelolaan keuangan Daerah/Desa dan Rapat Koordinasi Inventarisasi Pembangunan Masuk Desa. Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, namun untuk kegiatan IPMD tidak semua desa dapat melaporkan kegiatan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, oleh karena itu tim melaksanakan monitoring dan jemput bola agar laporan dapat tepat waktu.
- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelengaraan Ketentraman dan ketertiban umum dari pagu anggaran Rp.9.350.000 terealisasi 100,00%
- 6) Sub Kegiataan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dari pagu anggaran Rp.16.440.000 terealisasi 96,58% dari pagu anggaran

- tersebut untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Juknis Musrenbangdes, Pra Musrenbangcam dan Musrenbangcam Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, adapun kendala yang ada yaitu input laporan hasil Musrenbangdes (6 usulan) pada SIPD internet kurang lancar dan sering trouble.
- 7) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari pagu anggaran Rp.46.693.000 terealisasi 99,04% Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak mengalami kendala.
 - 8) Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dari pagu anggaran Rp. 9.148.000 terealisasi 99,98%.

Terciptanya sinkronisasi dan integrasi antara perencanaan pembangunan SKPD Kecamatan, SKPD Kabupaten, dan Pemerintah Desa

Untuk mencapai aparatur pemerintah desa yang akuntable maka perlu adanya pelatihan – pelatihan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai hal itu kami mengadakan pembinaan kelembagaan desa sedangkan kegiatan terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif dengan indikator kinerja berupa terlatihnya anggota Linmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

